

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekuasaan Politik

a. Definisi Kekuasaan

Kata kekuasaan diberi arti dengan kata dasar “kuasa” (untuk mengurus, memerintah, dsb), kemampuan dan kesanggupan. Sedangkan “kuasa” sendiri adalah: kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus, sesuatu, mampu, sanggup, kuat serta pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya). Sedangkan menurut Robert A. Dahl (1974: 407) yang mengemukakan bahwa: "kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan, dan kekuatan politik”(B.Nambo and Muhamad Rusdiyanto puluhuluwa, 2005).

Teori kekuasaan yang dikemukakan juga oleh Ibn Khaldun, Menurutnya masyarakat manusia memerlukan al-wazi' (pemimpin) untuk melaksanakan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan mencegah perbuatan aniaya di antara sesama. A-Wazi' diikuti karena memiliki kekuatan dan pengaruh atas masyarakatnya. Hubungan sosial masyarakatnya berdasarkan hubungan keturunan yang disebutnya ashbiyat (solidaritas kelompok) sebagai perekat kekuatan kelompok itu. Dengan demikian suatu daulah (pemerintahan) dapat terbentuk apabila suatu kelompok masyarakat mampu mengalahkan kelompok masyarakat

lainnya. Dan dengan kemenangan itu ia memperoleh kekuasaan politik. Sedangkan teori kontrak sosial adalah suatu teori yang menerangkan kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Artinya kekuasaan politik bersumber dari rakyat, dan legitimasinya melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga.

Menurut Max Weber Kekuasaan didefinisikan sebagai 'kesempatan bagi seseorang atau kelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam bentuk suatu aksi sosial, baik terhadap mereka yang menentang kehendak itu maupun terhadap yang mengikutinya. Poin penting dari definisi ini adalah kekuasaan tidak dimaknai sebagai pengaruh tetapi lebih pada tindakan seseorang. Tindakan seorang pemimpin politik selalu berorientasi pada tujuan dan motivasi dalam Dapatkan kekuasaan. Singkat kata, Weber memahami kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sekalipun ada perlawanan.

Menurut Mariam budiarjo kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara oleh yang bersangkutan tidak terpilih. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Menurut Maurice Duverger kekuasaan politik adalah kekuatan untuk mengatur masyarakat (Haboddin, 2017).

Kekuasaan dalam hal penerapan kebijakan hukum seringkali dikaitkan dengan politik (policy = kebijakan). Bila konsep tersebut dihubungkan dengan konsep politik, maka kekuasaan merupakan tujuan dari politik. Kekuasaan disini artinya kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar pihak tersebut memenuhi keinginan yang berkuasa. Kekuasaan ini kemudian digunakan untuk mencapai esensi utama dalam hukum yaitu keadilan. Dalam pandangan aliran positivisme (hukum positif), kekuasaan digunakan untuk memonopoli tujuan dari hukum-hukum dengan instrumen sanksi. Sanksi digunakan oleh penguasa kepada para pembangkang untuk menentukan hukum, serta adil dan ketidakadilan (Nuraini, 2018).

b. Definisi Politik

Kata “politik” yang berasal dari kata “politic” (Inggris) menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut diartikan: “acting or judging wisely, well judged, prudent” (A.S. Hornby, 1974: 645). Kata ini sejak dulu dikenal dalam bahasa atau kata Latin dengan “politicus” dan bahasa Yunani (Greek) “politicos yang diartikan: relating to a citizen”. Kedua kata ini berasal dari kata “polis” yang memiliki makna city yaitu kota. Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam bahasa kita (Indonesia) dengan mempunyai 3 (tiga) arti yaitu: “segala urusan dan tindakan/ kebijaksanaan, siasat dsb) mengenai pemerintahan sesuatu negara terhadap negara lain,

tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin “pengetahuan yaitu ilmu politik”.

Dalam kehidupan masyarakat istilah “politik” mula pertamanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul “Politeia” yang pula dikenal dengan istilah “Republik” (Deliar Noer, 1982: 11-12), dan selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan “Politica”. Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, di mana hal itu dapat diketahui bahwa “politik” merupakan istilah dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, sebab dalam kedua karya itu membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik.

Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai. Meskipun para pemikir dan ilmuwan politik tidak memiliki kesepakatan tentang pembatasan atau definisi “politik”, namun unsur-unsur sebagaimana disebut di atas dapat ditemukan secara parsial atau pun implisit dalam definisi yang mereka kemukakan.

Dari berbagai defenisi yang ada, ditemukan 2 (dua) kecenderungan tentang “definisi politik”, antaranya:

1. Pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya negara, yaitu urusan pemerintahan pusat dan daerah;
2. Pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik (B.Nambo and Muhamad Rusdiyanto puluhuluwa, 2005).

Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai politik menurut para ahli yaitu :

- a) Menurut Aristoteles

Pengertian politik menurut Aristoteles adalah suatu upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.

- b) Menurut Joice Mitchel

Pengertian politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya.

- c) Menurut Prof. Miriam Budhiarjo

Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.

d) Menurut Roger F. Soltau

Definisi politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu.

e) Menurut W.A Robson

Politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

f) Menurut Robert

Definisi politik menurut Robert diartikan secara singkat sebagai sebuah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia (Zakky, Agustus 3, 2021)

B. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Partai adalah "sarana" yang diperlukan untuk memperoleh kekuasaan dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum sebagai prasyarat yang legitim untuk memperoleh kekuasaan. Itulah sebabnya, Robert Huckshom mengatakan bahwa Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing dipemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan (Jurdi, 2020).

Secara umum bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Hermawan, 2020).

2. Partai politik Menurut Para Ahli

Berikut beberapa ulasan mengenai partai politik menurut para ahli yaitu :

1. Miriam Budiarmo

Pengertian partai politik menurut Miriam Budiarmo adalah suatu kelompok yang terorganisir dan para anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk menjalankan kebijaksanaan mereka.

2. H. Soltou

Arti partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan juga menjalankan kebijakan umum mereka.

3. Carl J. Friedrich

Menjelaskan bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dan mempunyai tujuan untuk merebut

atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil serta materiil.

4. Mac Iver

Mengungkapkan bahwa partai politik merupakan suatu perkumpulan yang terorganisir untuk bisa mendukung suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara yang sesuai dengan konstitusi.

5. Sigmund Neumann

Pengertian partai politik menurut Sigmund Neumann adalah suatu organisasi dari kegiatan politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan yang memiliki pandangan berbeda.

6. Edmund Burke

Definisi partai politik merupakan satu kesatuan struktur organisasi yang mempunyai tujuan menyebarluaskan usaha yang telah menjadi kesepakatan mereka untuk kepentingan nasional.

7. Maurice Duverger (1951)

Menurutnya partai politik bukanlah komunitas, tetapi kumpulan dari komunitas, didalam tubuh partai politik hadir berbagai kelompok kecil masyarakat yang menyebar ke berbagai pelosok suatu negara

dalam bentuk kaukus, cabang partai atau asosiasi lokal pendukung partai.

8. Ramlan Surbakti (1992:116)

Mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna menjalankan alternatif kebijakan yang sudah disusun.

9. Giovanni Sartoni

Pengertian partai politik menurut Giovanni Sartoni adalah kelompok politik yang ikut dalam pemilu dan melalui pemilu tersebut mampu menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan publik.

10. Robert K. Carr

Mengartikan partai politik sebagai suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah yang sah.

11. Ware (1996:5)

Menuturkan bahwa partai politik adalah suatu lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Partai politik merupakan lembaga yang menghantarkan rakyat pada tujuan kekuasaan dalam negara.

12. Firmanzah (2008:66)

Berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi publik yang memiliki tujuan untuk membentuk opini masyarakat dan membawa pimpinannya berkuasa dan memungkinkan para pendukung untuk mendapatkan keuntungan.

13. Ranney dan Kendal (1956)

Menjelaskan partai politik sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan memperoleh serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan public (Kiwi, Februari 12,2021).

3. Tujuan Partai Politik

Partai politik memiliki tujuan yang ditetapkan. Masing-masing partai memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga cara dan strategi yang digunakan juga tidak sama untuk mencapai tujuan. Beberapa tujuan partai politik sebenarnya dapat dibaca dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai. Tujuan partai politik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan derivasi dari berbagai konsep yang ada dalam berbagai tujuan partai politik.

Tujuan partai politik dapat dibagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan Khusus
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
 - b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan (Jurdi, 2020).

C. Fungsi Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti (1992) ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam system politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun kegiatan itu meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislative dan esekutif). Adapun fungsi partai politik baik dalam system politik demokrasi maupun totaliter, juga melaksanakan sejumlah fungsi lain diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi inilah para anggota memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

4. Pemandu Kepentingan

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternative kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemaduan kepentingan.

5. Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Sahya Anggara menyatakan bahwa Partai politik harus responsive terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat untuk kemudian disalurkan pada sistem politik melalui agregasi dan artikulasi kepentingan. Di pihak lain, partai politik juga melakukan diskusi dan penyebarluasan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Sahya Anggara, 2013).

6. Pengendali Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang di buat oleh pemerintah (Surbakti, 1992).

D. Sosialisasi Politik

1. Definisi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. Herbert H. Hyman, mendefinisikan sosialisasi politik sebagai "proses belajar dari pengalaman warga masyarakat atau sub kelompok, yang semula menghasilkan keteraturan, keseragaman yang secara langsung relevan bagi stabilitas sistem politik dan yang kemudian menghasilkan keragaman dan bentuk-bentuk institusional dari pengawasan. John W. Ellsworth dan Arthur A. Stahnke mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses kesadaran politik sejak kecil hingga dewasa, yaitu bagaimana seseorang belajar nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi kehidupan politik (Subakto and Ida, 2012).

Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan ketetanggaan, maupun dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi politik dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu

a. Pendidikan Politik

Suatu proses dialog antara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma, dan simbol politik negaranya dari berbagai

pihak dalam system politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

b. Indoktrinasi Politik

Proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan penuh disiplin. Partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik (Pureklolon, 2020).

2. Sosialisasi Politik Menurut Para Ahli

Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan tempat individu- individu berada. Sosialisasi politik menurut para ahli yaitu:

1. David Easten dan Jack Dennis

Dalam bukunya *Children in the Political System: Origins of Political Legimacy* memberikan suatu batasan tentang sosialisasi politik adalah Proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah laku.

2. Fred I. Greenstein

Dalam buku *Political Socialization* diangkat dari *International Encyclopedia of the Social Sciences* Vo. 14. 1968, New York, menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah: "Penanaman informasi politik yang sengaja, nilai-nilai dan praktik-praktik yang oleh badan

instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab ini; dan semua usahanya mempelajari politik, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak terencana, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk di dalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik, tetapi juga secara nominal belajar sikap nonpolitik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan."

3. R.S. Signal

Menurutnya sosialisasi politik adalah proses belajar yang terkait dengan norma politik yang dapat dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya untuk menerima suatu sistem politik yang sedang berlangsung.

4. Robinson

Dalam buku *Mass Communication; Theories and Research* menyatakan bahwa: "Sosialisasi politik merupakan proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar" (Shaya Anggara, 2013).

3. Tujuan Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik mengandung unsur pendidikan politik yang mampu membentuk serta menanamkan kepribadian serta kesadaran dalam berpolitik, sebagaimana dengan pendidikan politik yang berfungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk pola partisipasi masyarakat yang efektif dalam aktivitas politik suatu negara, sehingga perilaku tersebut

dapat diterima dan dipraktikkan dalam sistem politik. Berikut adalah tiga aspek tujuan sosialisasi politik:

a. Membangun Kepribadian Politik

Sosialisasi politik berorientasi memberikan pendidikan mengenai pemahaman isi dan penghayatan atas nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara, pemahaman mengenai etos normatif yang dijadikan sebagai landasan dalam membina dan mengembangkan diri sehingga membentuk kepribadian dalam berkehidupan dalam ranah politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan menjadi warga negara yang memiliki keterampilan serta bertanggung jawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. dilandaskan atas nilai dan norma yang berlaku.

b. Kesadaran Politik

Kesadaran merupakan kondisi psikologis yang mana seseorang tanggap pada suatu hal, jika dalam bahasan politik hal tersebut adalah kondisi politik atau iklim politik suatu bangsa. Mampu merangsang kesadaran masyarakat untuk menelaah permasalahan politik secara kritis dan rasional.

c. Partisipasi Aktif Sosialisasi politik

Partisipasi Aktif Sosialisasi politik bertugas menyadarkan fungsi politik yang dimiliki oleh setiap individu sehingga merubah sikap seseorang untuk memiliki keinginan yang kuat dalam berpartisipasi

secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik, seperti aktif dalam kelembagaan partai politik dan lain-lain (Cahyani, 2018).

E. Pemilu

1. Definisi Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Mahfud, 2019).

Pemilu menurut Ramlan Subakti disebut sebagai "instrumen". Instrumen berarti alat, atau "fasilitas" untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala. Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan representative democracy. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.

Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu pemilihan umum (*general election*) (Surbakti, n.d.).

Makna pemilu berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang mensyaratkan minimal dua hal yakni bebas dan adil atau *free and fair election*. Namun perkembangan demokrasi yang sangat dinamis, membuat banyak pihak tidak puas dengan dua kriteria demokrasi tersebut. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika :

1. Integritasnya tinggi.
2. Melibatkan banyak warga.
3. Berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi.
4. Imparsial dan adil.
5. Profesional dan independen.
6. Transparan.
7. Tepat waktu sesuai dengan rencana.
8. Tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan.
9. Teratur.
10. Peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang (Purba, 2021).

2. Fungsi Pemilu

Pemilihan umum juga memiliki fungsi diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sarana legitimasi politik, melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya.
2. Fungsi Perwakilan Politik, menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya.
3. Pemilihan umum sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa, keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat.
4. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat, Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi (Samosir, n.d.).